

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan perusahaan berkembang sesuai dengan tuntutan stakeholder terhadap informasi tentang perusahaan. Pada awalnya laporan perusahaan hanya menyajikan informasi berupa indikator keuangan perusahaan karena kebutuhan pengguna laporan keuangan terbatas pada pengambilan keputusan ekonomi yang mendasarkan pada informasi keuangan semata.¹ Laporan keuangan merupakan dokumen yang menyajikan informasi tentang kinerja keuangan suatu entitas pada periode tertentu. Laporan keuangan biasanya terdiri dari beberapa bagian utama, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jika suatu perusahaan hanya berorientasi pada kepentingan internal atau kepentingan perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya, tanpa memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditur, atau pemerintah, hal itu dapat memiliki beberapa konsekuensi negatif. Seperti halnya yang terjadi di Amerika terjadi krisis ekonomi dikarenakan oleh fokus perusahaan tertuju pada kepentingan internal. Dari peristiwa tersebut memicu dorongan perusahaan membuat laporan diluar segi finansial.²

Revolusi Industri 4.0, yang ditandai oleh integrasi teknologi digital ke dalam berbagai aspek industri, menuntut perusahaan untuk mengikuti perkembangan teknologi dengan cepat. Dalam era Revolusi Industri 4.0, teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), komputasi awan, big data analytics, robotika, dan lain-lain menjadi pusat transformasi bisnis. Dari kasus krisis global tersebut memicu lahirnya *integrated reporting*.³ IR memungkinkan manajemen untuk memahami dan mengkomunikasikan bagaimana perusahaan menciptakan nilai jangka panjang. Dengan melaporkan informasi keuangan dan non-

¹ Kustiani, N. A, "Penerapan Elemen-Elemen Integrated Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", *Info Artha*, 3 (44), (2017): 43- 60.

² Ahmad Rudi., "Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP Terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan Dengan Rerangka Integrated Reporting", Yogyakarta: *Jurnal Nominal*, Vol. VI, (2017): 125.

keuangan secara terintegrasi, IR membantu manajemen untuk melihat dampak berbagai faktor, termasuk faktor-faktor sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan, terhadap kinerja dan nilai perusahaan.³ Transparansi dalam pengungkapan informasi dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Perusahaan yang dikenal karena pengungkapan yang jujur dan terbuka cenderung lebih dipercaya dan dihormati oleh pemangku kepentingan.

Integrated reporting merupakan pendekatan dalam pelaporan perusahaan yang bertujuan untuk menyajikan informasi yang terintegrasi, komprehensif, dan relevan tentang kinerja keuangan dan non-keuangan suatu perusahaan dalam satu laporan. Tujuan utama dari IR adalah untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana sebuah perusahaan menciptakan nilai jangka panjang, serta bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang di sekitarnya.⁴ Sedangkan menurut *The International Integrated Reporting Council*, *integrated reporting* diartikan integrasi atau penggabungan informasi keuangan dan non-keuangan yang biasanya dipisahkan dalam laporan perusahaan tradisional. Tujuan utama dari IR adalah untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan relevan kepada para pemangku kepentingan, seperti investor, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik.

Semakin berkembangnya kebutuhan dalam hal pengambilan keputusan atas suatu perusahaan menimbulkan isu baru dalam akuntansi, perusahaan kini tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi bagi investor dan kreditor dalam kapasitas mereka sebagai penyedia sumber daya keuangan bagi perusahaan, tetapi laporan perusahaan diharapkan juga dapat memberikan informasi mengenai efek keberadaan perusahaan bagi lingkungan sosial dan lingkungan alam.⁵

³ P. Velte, & M. Stawinoga, "Integrated reporting: The current state of empirical research, limitations and future research implications", *Journal of Management Control*, 28(3), (2017): 275-320.

⁴ C. Churet, & Eccles, R. G, "*Integrated Reporting, Quality of Management, and Financial Performance*" April 7, 2014. Ssrn. <https://doi.org/10.1111/jacf.12054> di akses pada tanggal 01 Maret 2023

⁵ S. Permata, dkk. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Terhadap Integrated Reporting Dengan Auditor

Pesatnya perkembangan dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi turut serta memberikan sumbangsih atas terciptanya sistem pelaporan yang paripurna dan mencakup semua aspek dalam lingkup perusahaan. Entitas bisnis atau korporasi tidak hanya dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang sebatas memberikan informasi finansial, lebih dari itu, ternyata digitalisasi zaman menuntut sebuah pelaporan yang lebih menyeluruh dan komprehensif.⁶ Menurut *Association of Chartered 2 Certified Accountants* (ACCA) dan Eufosif, (2013) saat ini laporan keuangan tidak cukup relevan, informasi keuangan akan lebih baik jika di integrasikan dengan laporan non keuangan.

Laporan keuangan telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam lingkungan bisnis. Semakin banyak perusahaan yang memasukkan informasi non-keuangan, seperti dampak sosial dan lingkungan, dalam laporan keuangan mereka. Ini mencerminkan perhatian yang meningkat terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam dunia bisnis modern. perkembangan laporan keuangan menjadi laporan keberlanjutan adalah salah satu tren yang signifikan dalam praktik pelaporan perusahaan saat ini. Laporan keberlanjutan, juga dikenal sebagai Laporan Keberlanjutan atau Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), merupakan bentuk pelaporan yang memperluas cakupan informasi yang disediakan oleh perusahaan untuk mencakup aspek-aspek non-keuangan dari operasi mereka, seperti dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan (ESG).⁷

Konsep keuangan menyeluruh atau *comprehensive financial reporting* diperkenalkan oleh *International Integrated Reporting Council* (IIRC). IIRC adalah organisasi global yang didirikan pada

Eksternal Sebagai Variabel Moderas (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Tahun 2014-2018)". *Jurnal Ekobisman*, 4 (33), (2020): 166-182.

⁶ Novaridha, dkk. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Elemen-Elemen 94 Integrated Reporting", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), (2017): 1-13.

⁷ Astria Novaridha Ira, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Elemen-Elemen Integrated Reporting (Studi Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Listing di BEI Tahun 2015)", Yogyakarta: *JOM Vekon*, Vol. 4, No. 1, (2017): 33-99.

tahun 2010 dengan tujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan praktik pelaporan terintegrasi di seluruh dunia. Salah satu hasil kunci dari kerja IIRC adalah *Framework for Integrated Reporting*, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2013. *Framework* ini menyediakan pedoman bagi perusahaan untuk menyusun laporan terintegrasi yang mencakup informasi tentang kinerja keuangan dan non-keuangan mereka dalam satu laporan. *Framework* ini menekankan pentingnya integrasi informasi keuangan dan non-keuangan dalam memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana perusahaan menciptakan nilai jangka panjang. Dalam konteks *Framework for Integrated Reporting*, konsep keuangan menyeluruh mengacu pada penyajian informasi yang mencakup aspek-aspek keuangan dan non-keuangan dari operasi perusahaan, termasuk aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Laporan terintegrasi yang dihasilkan berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kinerja dan nilai perusahaan kepada para pemangku kepentingan.⁸

Pelaporan keuangan yang terintegrasi muncul sebagai dampak dari kebutuhan akan informasi yang lebih holistik dan komprehensif tentang kinerja perusahaan. Meskipun tidak ada peristiwa tunggal atau krisis tertentu yang secara langsung memicu perkembangan ini.⁹ Meskipun tidak secara langsung memicu munculnya laporan keuangan yang terintegrasi, krisis keuangan global pada tahun 2008 memperkuat kebutuhan akan informasi yang lebih komprehensif tentang kinerja perusahaan. Krisis tersebut menggaris bawahi pentingnya memperhitungkan risiko dan dampak non-keuangan dalam evaluasi kesehatan dan keberlanjutan perusahaan. Pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, konsumen, dan masyarakat umum, semakin menuntut informasi yang lebih lengkap tentang kinerja perusahaan. Mereka memperhatikan faktor-faktor non-keuangan seperti dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan (ESG) dalam evaluasi perusahaan.

⁸ Pricewaterhouse Coppers, “*Point of View Integrated Reporting Going Beyond The Financial Results*.”, United State, Agust, 2013. <https://www.pwc.com/my/en/assets/services/1308-point-of-view-integrated-reporting.pdf> diakses pada 14 Maret 2023

⁹ Azzahra, B, “Adopsi Integrated Reporting : Strategi Korporasi Berkelanjutan Menuju Pencapaian SDG 2030”, *Accounting Global Journal*, 6(1), (2022): 78-103.

Tanpa adanya peraturan yang mengharuskan penerapan *integrated reporting* di laporan perusahaan di Indonesia, banyak perusahaan mungkin belum mengadopsi pendekatan ini secara luas. Meskipun belum ada persyaratan hukum, pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, dan masyarakat umum mungkin menuntut informasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi tentang kinerja perusahaan. Adopsi *integrated reporting* dapat memenuhi kebutuhan ini dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan.¹⁰ Dalam PSAK No 1 per 2013 paragraf empat belas, perusahaan diperbolehkan untuk menyajikan laporan tambahan atau disebut juga sebagai "informasi tambahan". Laporan tambahan ini adalah informasi yang diberikan oleh perusahaan sebagai tambahan atas laporan keuangan yang utama. Meskipun tidak wajib, laporan tambahan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan kepada para pemangku kepentingan.¹¹

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pendirian, operasional, dan tanggung jawab perusahaan, termasuk yang bergerak di bidang sumber daya alam. Meskipun UU ini tidak secara langsung mengatur tentang kewajiban perusahaan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, namun prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah menjadi bagian dari praktek bisnis yang diharapkan dalam operasi perusahaan di Indonesia.¹² Meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan, UU ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan kesehatan masyarakat dalam kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan

¹⁰ Prijanto, T, & Widianingsih, Y, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Voluntary Disclosure Perusahaan Go Public", *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 9 (1), (2012): 23–31.

¹¹ Hery, *Akuntansi dan Rahasia Dibalikinya (untuk para manajemen nonakuntansi)*. (Edisi Satu), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 145.

¹² Undang-Undang No. "40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas". Lembar Negara No.160 Tahun 2007. Tambahan Lembar Negara No.4756.

lingkungan dari kegiatan mereka serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di wilayah di mana mereka beroperasi.¹³ Masalah ketidaktersediaan instrumen pelaporan yang terukur dan akuntabel untuk melaporkan praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kinerja berkelanjutan telah menjadi perhatian utama dalam praktik bisnis di Indonesia. Dalam rangka mengatasi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan *Integrated Reporting* bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. POJK No. 51/2017 bertujuan untuk mendorong dan mengatur penerapan praktik keuangan berkelanjutan di kalangan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik di Indonesia.

Integrated Reporting (IR) terdiri dari delapan komponen utama yang membentuk kerangka kerja untuk menyajikan informasi terintegrasi tentang kinerja perusahaan. Berikut adalah delapan komponen tersebut:¹⁴

1. *Organizational overview and operating context* yang menjelaskan visi, misi, apa yang dilakukan oleh perusahaan dan dalam lingkungan seperti apa perusahaan beroperasi.
2. *Governance* atau tata kelola yang menjelaskan bagaimana struktur tata kelola perusahaan, dan bagaimana struktur ini mendukung penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
3. *Business model* yang menggambarkan bagaimana sistem perusahaan dalam mengubah input menjadi *output* dan *outcome* melalui kegiatan bisnis dengan tujuan untuk memenuhi tujuan strategis perusahaan dan penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
4. *Risk and opportunities* dimana perusahaan menyajikan faktor kunci dari risiko dan peluang yang dihadapi oleh perusahaan, bagaimana faktor kunci ini akan mempengaruhi penciptaan nilai perusahaan, dan bagaimana perusahaan menanggulangi

¹³ R Breliastiti, "Penerapan Standar GRI sebagai Panduan Penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2020 Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer dan NonPrimer di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Ekobisman* 6(1), (2021): 138-1561.

¹⁴ E.D Wahyuni, "Asimetri Informasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Penerapan *Integrated Reporting* Terhadap Stock Return", *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), (2021): 69- 79.

hal tersebut, termasuk di dalamnya ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan sumber daya yang relevan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

5. *Strategy and resource allocation* yang berisi tujuan strategis perusahaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, bagaimana strategi perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut, rencana alokasi sumber daya dalam rangka implementasi strategi, serta bagaimana perusahaan akan mengukur pencapaian dan target *outcome* dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
6. *Performance* menjelaskan bagaimana pencapaian tujuan strategis perusahaan yang bisa berisi baik informasi kuantitatif maupun kualitatif serta apa saja key outcomes yang berpengaruh terhadap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.
7. *Outlook* berisi apa saja tantangan dan ketidakpastian yang bisa saja dihadapi oleh perusahaan dalam rangka menjalankan strategi serta dampak potensial tantangan dan ketidakpastian tersebut terhadap model bisnis serta kinerja dan outcome di masa yang akan datang.
8. *Basis of Presentation* berisi bagaimana perusahaan menentukan hal – hal yang material untuk ditampilkan dalam *integrated report*, termasuk bagaimana perusahaan mengkuantifikasikan dan mengevaluasi hal – hal tersebut.¹⁵

Integrated reporting adalah suatu laporan yang terintegrasi karena menggabungkan informasi tentang kinerja keuangan dan non-keuangan suatu perusahaan dalam satu laporan tunggal. Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan yang menyatakan telah menerapkan *integrated reporting* antara lain: (1) PT Aneka Tambang, Tbk., (2) PT Semen Indonesia, Tbk., (3) PT United Tractors, Tbk., dan (4) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., (5) PT Astra Indonesia, Tbk., (6) PT Unilever Indonesia, Tbk., (7) PT Adaro Energi Indonesia, Tbk., (8) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

¹⁵ E.D Wahyuni, E.D, “Asimetri Informasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Penerapan *Integrated Reporting* Terhadap Stock Return”, *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1),(202): 69- 79.

Di Indonesia, *integrated reporting* memiliki hubungan dengan permasalahan pada ketidak lengkapan laporan keuangan. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 bahwa PT Kresna Graha Investama Tbk pada tahun 2019 tercatat telah menerbitkan laporan keuangan terintegrasi pada tahun 2018, namun ternyata terdapat ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan laporan terintegrasi yang disampaikan.

Menurut hasil investigasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat beberapa pernyataan yang tidak konsisten antara laporan keuangan dan laporan terintegrasi PT Kresna Graha Investama Tbk, terutama terkait dengan informasi keuangan yang tidak dijelaskan dengan cukup rinci. Selain itu, OJK juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI).¹⁶

Ketidaksesuaian ini kemudian memicu pihak regulator untuk melakukan tindakan hukum terhadap PT Kresna Graha Investama Tbk, termasuk memberikan sanksi administratif dan menunda penerbitan saham baru oleh perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *integrated reporting* dapat membantu perusahaan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerjanya, namun perusahaan juga perlu memastikan bahwa laporan terintegrasi yang disampaikan konsisten dengan laporan keuangan dan mengikuti standar yang berlaku.

Dalam hal ini, pihak regulator seperti OJK dan BEI memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar pelaporan yang berlaku dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangannya, termasuk melalui pengembangan *integrated reporting*.

Kasus penyalahgunaan laporan keuangan di PT. Cakra Mineral Tbk (CKRA) adalah contoh lain dari tantangan dalam praktik pelaporan keuangan di Indonesia. Kasus yang melibatkan PT. Cakra Mineral Tbk (CKRA) dengan dugaan penggelapan,

¹⁶ "OJK Tegur PT Kresna Graha, Ada Kesalahan di Laporan Terintegrasi", CNBC Indonesia, 10 April, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240226151442-17-517647/ojk-siapkan-banding-ini-kronologi-kasus-kresna-life>

manipulasi akuntansi, dan menyesatkan investor pada tahun 2016 merupakan contoh serius dari penyalahgunaan laporan keuangan dan pelanggaran etika bisnis. Penggelapan, manipulasi akuntansi, dan penyajian informasi yang menyesatkan investor merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan integritas pasar keuangan. Kasus semacam ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi para investor, serta merusak kepercayaan dan kestabilan pasar.¹⁷ Kasus seperti ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan, serta perlunya kerjasama antara regulator, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga integritas pasar keuangan dan melindungi kepentingan investor.

Pengungkapan laporan keuangan dengan *integrated reporting* dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti Dewan Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP. Faktor pertama yang mampu memengaruhi *integrated reporting* adalah dewan komisaris independen. Menurut Abdullah Basalamah, dewan komisaris independen adalah dewan yang anggotanya tidak memiliki hubungan bisnis atau kepentingan saham yang signifikan dengan perusahaan. DKI bertugas mengawasi dan memberikan saran terhadap pengambilan keputusan yang strategis dan kebijakan manajemen perusahaan.¹⁸

Dewan komisaris independen (DKI) dan *integrated reporting* (IR) memiliki hubungan yang erat karena DKI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang dan meminimalkan risiko, termasuk risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG). Penelitian yang dilakukan oleh Sunardi & Suherman menunjukkan bahwa DKI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan terintegrasi.¹⁹ Sementara itu penelitian berbeda ditunjukkan oleh

¹⁷ “Direksi CKRA dilaporkan oleh OJK dan Polisi”, JPNN.Com , 22 Desember, 2016, <https://www.jpnn.com/news/direksi-ckradilaporkan-ke-ojk-dan-polisi>

¹⁸ Basalamah, *Good Corporate Governance (GCG) untuk Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)

¹⁹ Sunardi, & Suherman, “The Effect of Independent Commissioners on Integrated Reporting in Indonesia”, *International Journal of Innovation*,

Moeljadi yang menjelaskan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan *integrated reporting*.²⁰

Faktor kedua yang mampu mempengaruhi *integrated reporting* adalah struktur kepemilikan. Menurut Pambudhi Suryanata, struktur kepemilikan adalah distribusi kepemilikan saham suatu perusahaan kepada pemegang saham. Struktur kepemilikan menggambarkan siapa yang memiliki saham dalam perusahaan dan seberapa besar kepemilikan tersebut.²¹ Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham institusional yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan pelaporan IR. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan struktur kepemilikan mereka dalam menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan memperkuat pelaporan terintegrasi mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Nabihah & Rusbin menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh positif pada *integrated reporting*. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Rahayuningsih & Pujiono yang menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap *integrated reporting*.

Faktor ketiga yang mampu memengaruhi *integrated reporting* adalah komite audit. Amran Rasli dan Abdul Halim Abdul Majid mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite independen yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaporan keuangan perusahaan, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar akuntansi dan regulasi yang berlaku.²²

Creativity and Change, 12(4), (2020): 392–407. doi: 10.7771/1540-7780.1288.

²⁰ Moeljadi Merda, Nastashia Angelina, Stevanus Pangestu, “Determinan dan Konsekuensi Pengungkapan Integrated Reporting”, *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 20, No. 2. (2020)

²¹ Suryanata, P *Good Corporate Governance: Teori, Konsep dan Implementasi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)

²² A, Rasli, & Majid, A. H. A, *Corporate Governance: Teori dan Praktik di Malaysia dan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad & Sari menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh pada pengungkapan *integrated reporting*. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Prawesti menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan *integrated reporting*. Komite audit dan *integrated reporting* (IR) memiliki hubungan yang erat karena komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara akurat dan konsisten dengan standar akuntansi yang berlaku. Sementara itu, IR adalah sebuah konsep pelaporan perusahaan yang terintegrasi yang mengeksplorasi dan menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan nilai jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor-faktor non-keuangan yang mencakup lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

Faktor keempat yang mampu memengaruhi *integrated reporting* adalah ukuran perusahaan. Menurut Agus Sartono, ukuran perusahaan adalah suatu dimensi yang mencakup berbagai aspek seperti total aset, jumlah karyawan, jumlah cabang atau unit bisnis, serta skala operasi dan pemasaran perusahaan.²³ Ukuran perusahaan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi adopsi dan pelaporan IR. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pelaporan IR. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan dapat mempertimbangkan ukuran perusahaan mereka dalam menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan memperkuat pelaporan terintegrasi mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulyan et al menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh pada *integrated reporting*. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Ahmad yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *integrated reporting*. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Novaridha yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *integrated reporting*.²⁴

²³ Sartono, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2016)

²⁴ IA Novaridha, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Elemen-Elemen Integrated Reporting (Studi pada Perusahaan Non-Keuangan yang Listing di BEI Tahun 2015)", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), (2017): 3399-3411. Diakses pada 14 April 2024,

Faktor kelima yang mampu mempengaruhi *integrated reporting* adalah ukuran KAP. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adopsi dan pelaksanaan *integrated reporting* (IR) oleh perusahaan. Namun, perlu dicatat bahwa ukuran KAP bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi adopsi IR. KAP yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya, termasuk personel dan keahlian, yang memungkinkan mereka untuk memberikan dukungan konsultasi dan penilaian lebih lanjut terkait dengan proses pelaporan terintegrasi.

Penelitian Ghani *et. al.* memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran KAP dengan IR. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa audit independen dengan *audit firm's size* yang besar akan cenderung memiliki kualitas IR yang baik.²⁵

Fenomena yang terjadi adalah masih banyak perusahaan yang belum menerapkan *integrated reporting* secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaporan *integrated reporting* adalah dewan komisaris independen, struktur kepemilikan, komite audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapan *integrated reporting*, yaitu:

1. Dewan komisaris independen yang tidak memenuhi syarat dan tidak terlibat secara aktif dalam proses pelaporan *integrated reporting*.
2. Struktur kepemilikan yang masih terkonsentrasi pada kelompok pemegang saham tertentu, sehingga kurang memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder perusahaan.
3. Komite audit yang kurang aktif dan tidak memiliki peran yang kuat dalam pengawasan proses pelaporan *integrated reporting*.
4. Ukuran Perusahaan yang terlalu kecil atau terlalu besar, sehingga sulit untuk mengimplementasikan pelaporan *integrated reporting* dengan baik.

<https://media.neliti.com/media/publications/134022-ID-pengaruh-kepemilikan-institusional-ukura.pdf>

²⁵ EK Ghani, *et. al.* "Factors Influencing Integrated Reporting Practices Among Malaysian Public Listed Real Property Companies: A Sustainable Development Effort", *International Journal of Managerial and Financial Accounting*. (2018): 145-162.

5. Ukuran KAP yang tidak memadai, sehingga kurang mampu memberikan jasa konsultasi dan audit yang baik terkait dengan pelaporan *integrated reporting*.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan IR di Indonesia masih terbatas, khususnya untuk perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Indeks*. Padahal, perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Indeks* Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan juga prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnisnya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Rejeki & Ahmar. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Rejeki & Ahmar adalah adanya perbedaan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2019-2022. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Ukuran KAP Terhadap Pelaporan IR Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks Periode 2019-2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pelaporan *integrated reporting* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2019 – 2022?
2. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pelaporan *integrated reporting* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2019 – 2022?
3. Apakah komite audit independen berpengaruh terhadap pelaporan *integrated reporting* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 2019 – 2022?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pelaporan *integrated reporting* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 2019 – 2022?

5. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap pelaporan *integrated reporting* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index 2019 – 2022*?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji & menganalisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pelaporan *Integrated Reporting* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di *Jakarta Islamic Index 2019 – 2022*.
2. Untuk menguji & menganalisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pelaporan *Integrated Reporting* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di *Jakarta Islamic Index 2019 – 2022*.
3. Untuk menguji & menganalisis Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Pelaporan *Integrated Reporting* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di *Jakarta Islamic Index 2019 – 2022*.
4. Untuk menguji & menganalisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pelaporan *Integrated Reporting* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di *Jakarta Islamic Index 2019 – 2022*.
5. Untuk menguji & menganalisis Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Pelaporan *Integrated Reporting* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di *Jakarta Islamic Index 2019 – 2022*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Perusahaan.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *integrated reporting* pada perusahaan. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelaporan mereka dan memperkuat reputasi perusahaan.
2. Regulator.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi regulator dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pelaporan *integrated reporting*. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas perusahaan serta memperkuat kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan.

3. Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan akademisi dalam pengembangan penelitian di bidang pelaporan keuangan dan *integrated reporting*. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti dan akademisi dalam pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang pelaporan keuangan dan *integrated reporting*.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terdiri dari lima bab yang akan di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Mengenai Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP terhadap *Integrated Reporting* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* Periode 2019 – 2022.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep yang menjadi dasar bagi penelitian yang dapat menjadi sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang pendekatan, desain, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akan disajikan hasil dari analisis data yang telah dilakukan serta pembahasan terkait temuan-temuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menyajikan kesimpulan penelitian secara jelas dan ringkas, serta memberikan saran yang bermanfaat bagi pembaca untuk menerapkan temuan penelitian dalam konteks praktis..